

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan riil per kapita suatu negara mengalami kenaikan dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada *Gross National Product* (GNP) saja namun juga memerlukan perbaikan dari segi sosial, sistem kelembagaan dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Meirer, 1995) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Todaro and Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, (2) meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Dari ketiga nilai pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan harus memiliki ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan hidup dan peningkatkan standar hidup mulai dari penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan hingga mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, negara-negara di dunia khususnya negara berkembang tidak lepas dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pengangguran di banyak negara (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, apabila terdapat masyarakat yang masih belum merasakan hasil dari pembangunan, maka terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tengah terjadi. Samirin (2014) menyebutkan bahwa semakin melebarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, masih lebarnya perbedaan kesejahteraan antara wilayah barat dan timur Indonesia, masih terpuruknya masyarakat di daerah perbatasan dan banyaknya masyarakat miskin yang belum terpenuhi syarat minimal mereka untuk memanusiakan dirinya adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah dalam pembangunan di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan permasalahan yang umum terjadi di banyak negara. Mulai dari negara miskin, berkembang hingga maju tidak lepas dari permasalahan ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi masing-masing wilayah. Karena perbedaan tersebut tiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan sehingga dapat dilihat bahwa setiap daerah terdapat wilayah maju dan terbelakang.

Ketimpangan pembangunan wilayah justru lebih rentan terjadi di negara berkembang. Hal ini lantaran pada saat proses pembangunan terjadi, daerah dengan kondisi pembangunan yang telah baik lebih mendapatkan perhatian dan peluang untuk meningkatkan pembangunannya. Berbeda dengan wilayah di kondisi yang terbelakang cenderung tidak dapat memaksimalkan pembangunan karena sarana dan prasarana yang terbatas ditambah dengan kondisi sumber daya manusia yang rendah.

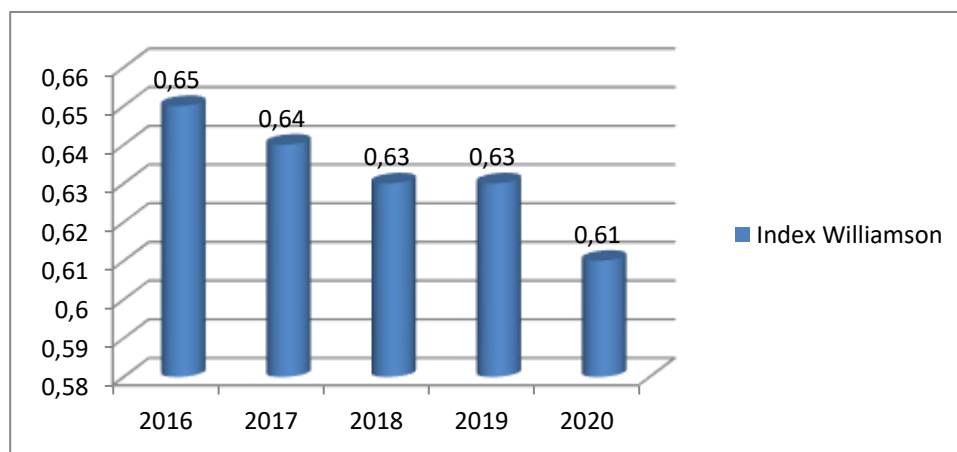
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau jawa dengan total 35 kabupaten/kota. Sebagai salah satu provinsi padat penduduk di Indonesia, Jawa Tengah tidak lepas dari masalah ketimpangan pembangunan. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi tiap daerah yang diakibatkan oleh migrasi penduduk produktif yang memiliki skill ke daerah-daerah yang telah berkembang, investasi yang lebih besar di daerah berkembang, hingga kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terkonsentrasinya sosial dan ekonomi yang terpusat di daerah berkembang (BPS, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sendiri dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan, namun dalam kasus Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar kabupaten/kota mengakibatkan dampak negatif bagi daerah-daerah dengan pembangunan yang masih rendah, sehingga berakibat pada tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah adalah dengan menggunakan index williamson dengan hasil apabila nilai

index williamson mendekati angka 1, maka ketimpangan di daerah tersebut termasuk tinggi dan apabila nilai index williamson mendekati angka 0 maka ketimpangan daerah tersebut termasuk rendah.

Gambar 1. 1 Perkembangan Index Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah 2020

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa angka ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan oleh nilai index williamson di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 0,65 yang mana ketimpangan pembangunan di tahun tersebut termasuk tinggi. Perbaikan pemerataan pembangunan terlihat pada tahun 2017 dimana nilai ketimpangan jawa tengah turun menjadi 0,64 dan terus menunjukkan trend yang baik di tahun 2018 dengan nilai ketimpangan sebesar 0,63 dan angka tersebut bertahan hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan perbaikan pemerataan pembangunan dengan nilai ketimpangan sebesar 0,61. Meskipun Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan dalam pemerataan pembangunan, namun ketimpangan pembangunan masih berkisar di angka 0,6 dimana angka tersebut mendekati angka 1 yang berarti ketimpangan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi.

Ketimpangan pembangunan harus diatasi dengan tepat sasaran agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial hingga politik. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ketimpangan pembangunan wilayah merupakan isu penting dalam upaya pemerataan pembangunan suatu wilayah, maka topik penelitian yang diambil penulis yaitu, **Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan dana transfer pusat maupun mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi agar tercapai pemerataan pembangunan.
2. Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

agar tepat sasaran dan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan gambaran ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah serta memberikan bahan masukan bagi dinas terkait untuk menentukan arah pembangunan ekonomi yang efektif sehingga mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
4. Bagi akademisi dan peneliti sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

### E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisregresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogDP}_{it} + \beta_2 \text{LogGE}_{it} + \beta_3 \text{Growth}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

IW	= Ketimpangan pembangunan antar wilayah (angka indeks)
DP	= Dana perimbangan pada kabupaten/kota (persen)
GE	= Pengeluaran pemerintah daerah pada kabupaten/kota (persen)
Growth	= Laju Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota (persen)
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien regresi
Log	= Operator logaritma
$i$	= Observasi ke $i$
$t$	= Tahun ke $t$
$\varepsilon$	= Error

Sumber: **Hj. Siti Mutmainah Zulfaridatul Yaqin, dkk (2018)** *pengaruh anggaran belanja, infrastuktur, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi kalimantan selatan*. AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi. 9(1):63-75. **Wanti Oktaviani, dkk** 2017 *pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di provinsi jambi*. E jurnal: Perspektif

ekonomi dan Pembangunan Daerah 6 (3):105-112. **Endang Kusdiah Ningsih, dkk** 2019. *pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pembangunan di propinsi sumatera selatan*. JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. 15(1):14-22.

## **E.2. Data Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data (1) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan; (2) Jumlah Penduduk; (3) Dana Peimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil; (4) Realisasi Pengeluaran Pemerintah dan; (5) Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK).

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan dijabarkan tentang latar belakang masalah uraian mengenai kondisi yang menjadi alasan mengapa tema tersebut diangkat. Pada bab ini juga disertai dengan data-data yang dijabarkan, dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka menguraikan teori-teori terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian. Dalam tinjauan pustaka juga dijabarkan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab metodologi penelitian diuraikan jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan menjabarkan analisis deskriptif yang merupakan perkembangan kondisi ekonomi yang diikuti oleh variabel dalam model analisis. Menguraikan deskripsi pengolahan data dengan model ekonometrika yang dipilih dan melakukan interpretasi dari hasil pengolahan data dan interpretasi ekonomi.

### **BAB VPENUTUP**

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data penelitian. Dalam bab ini juga memuat saran atau rekomendasi terhadap tema yang diangkat dalam penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**